

Komunikasi Lintas Etnis di Pulau Weh-Sabang

Indra Muda
Universitas Medan Area
indramudahts@gmail.com

Abstrak

Kota Sabang merupakan salah satu daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan struktur penduduk yang variatif. Meskipun demikian, konflik antar etnis sepanjang sejarah Kota Sabang tidak pernah terjadi. Ketika terjadi konflik Aceh tahun 1998 memaksa etnis non Aceh eksodus ke luar Aceh, sementara di Kota Sabang tidak demikian. Warganya tetap dapat hidup saling berdampingan diantara etnis yang berbeda. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang mendorong terciptanya kerukunan hidup antara etnis di Kota Sabang. Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan beberapa warga kota Sabang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terciptanya kerukunan antaretnis di Kota Sabang adalah karena masyarakat memiliki kekompakan serta saling mengenal satu dengan yang lain. Hal ini juga didorong masa lalu kota Sabang yang pernah memiliki status sebagai pelabuhan bebas, sehingga masyarakat sudah terbiasa berinteraksi dengan etnis berbeda.

Kata Kunci: Komunikasi lintas etnis, Pulau Weh, Sabang

Abstract

The city of Sabang is one of the areas in Aceh province that has varied population structure. Despite of it, conflict between ethnics never happens throughout its history. When ethnic conflicts happened in Aceh back in 1998, many non-Acehnese were forced to leave the city. However, that was not the case in Sabang. The people have been living peacefully alongside each other regardless the ethnics. This research aims to look at the factors that encourage the harmony of cross-ethnics people in Sabang. Data collecting is done by observation as well as interview with some Sabang residents. This study finds that the harmony of people living in Sabang is because they bond and know each other. It is also influenced by the past of Sabang as the city of free port. Hence, people in Sabang are accustomed to interact with different ethnics.

Keywords: cross-ethnic communication, Weh Island, Sabang

PENDAHULUAN

Pulau Weh, yang lebih dikenal dengan nama Sabang, adalah salah satu daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang memiliki struktur penduduk yang variatif. Hal ini ditandai dengan beragam agama, logat, adat istiadat yang dianut masyarakat-

nya. Meskipun tingkat keberagaman masyarakatnya variatif, komunikasi antaretnik tetap terjaga dengan baik. Konflik antaretnik sepanjang sejarah Kota Sabang tidak pernah terjadi. Hal ini tentu berbeda dengan beberapa daerah lainnya di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Konflik yang terjadi di Aceh tahun 1998 memaksa etnis non-Aceh eksodus ke luar Aceh, namun di kota Sabang tidak demikian. Warganya tetap dapat hidup saling berdampingan diantara etnis yang berbeda.

Pengalaman Kota Sabang yang pernah mendapat status sebagai pelabuhan bebas, mungkin salah satu faktor yang menyebabkan pola pikir masyarakatnya berbeda dibandingkan dengan pola pikir masyarakat di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) lainnya. Walaupun status sebagai pelabuhan bebas sudah ditutup, keterbukaan masyarakat Kota Sabang terhadap etnis non-Aceh tetap terpelihara dengan baik.

Pembukaan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, merupakan awal diditutupnya Kota Sabang sebagai pelabuhan bebas, berdasarkan UU No 10/1985. Pada tahun 1993 dibentuk kerjasama ekonomi regional yaitu; *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) yang membuat posisi pulau ini sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan. Pada tahun 1997 di pantai Gapang, berlangsung Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diprakarsai BPPT dengan fokus kajian pengembangan kembali Sabang. Kemudian pada tahun 1998, Kota Sabang dan kecamatan *Puloaceh* di Kabupaten Aceh Besar dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie dengan Keppes No. 171 tanggal 28 September 1998.

Era baru Kota Sabang terjadi pada tahun 2000 ketika dicanangkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dengan diterbitkan Inpres No. 2 Tahun 2000 pada tanggal 22

Januari 2000. Terbitnya Peraturan Pemerintah pengganti U.U. No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 yang selanjutnya disahkan menjadi U.U. No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, maka aktivitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri. Namun, pada tahun 2004, aktivitas ini terhenti karena seluruh Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.

Setelah reformasi dan otonomi daerah (1998), konflik vertikal-horizontal (1999-2005), pasca tsunami (26 Desember 2004), dan perdamaian RI dan GAM (*MoU* 15 Agustus 2005), Kota Sabang yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai Kawasan Pelabuhan Terpadu (KAPET) mulai ramai kembali, terutama dari aktivitas pariwisata. Namun, kebijakan tersebut sampai saat ini pengaruhnya belum terlihat signifikan, kecuali dikenal sebagai perdagangan mobil eks Singapura dan tujuan pariwisata. Belum meningkatnya aktivitas perdagangan dan perekonomian serta pariwisata sepertinya belum menampakkan geliat kebangkitan Sabang sebagai kota terdepan di gerbang bagian barat Indonesia.

Komposisi penduduk Kota Sabang dapat dikatakan berada dalam kondisi yang stabil. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Sabang lebih kurang 32.191 jiwa dengan tingkat kepadatan 251 jiwa/km² yang mendiami 2 (dua) kecamatan yakni 15.662 jiwa berdomisili di Kecamatan Sukajaya dan 15.229 jiwa berdomisili di Kecamatan Sukakarya (Kantor Statistik Kota Sabang, 2014:9). Penduduknya terdiri dari multietnis, antara lain; Aceh, Jawa, Padang, Tapanuli, Cina dan lain-lain. Mata pencaharian penduduknya antara lain sebagai pegawai, pedagang, nelayan, tukang dan petani. Dengan keragaman etnis yang mendiami Kota Sabang, namun adat

dan budaya Aceh lebih berpengaruh pada masyarakatnya. Adat istiadat yang berlaku sangat dipengaruhi nuansa Islam, dimana pihak laki-laki sebagai pemimpin (patriarki). Pengaruh budaya Aceh sangat kuat tertanam pada masyarakat. Ini tak lain karena mayoritas masyarakatnya adalah suku Aceh dan beragama Islam. Bahasa sehari-hari yang umumnya digunakan adalah bahasa Aceh dan bahasa Indonesia.

Dalam suasana pergaulan masyarakat Kota Sabang, umumnya mereka saling mengenal, walau terkadang tidak mengetahui namanya. Indra Muda dalam rubrik Opini surat kabar Analisa berjudul “Kerukunan Antar Etnik di Pulau Weh-Sabang” menyebutkan, “Rasa persaudaraan dan kekompakan masyarakat Sabang lebih melekat dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi NAD”. (*Analisa* 26 Desember 2014 hal. 28). Hal ini dapat dilihat, ketika seseorang melintas di jalan mengendarai kendaraan atau berjalan kaki di beberapa tempat, tegur sapa diantara mereka sangat kental dan senantiasa terjadi. Suasana yang demikian dipengaruhi oleh seringnya pertemuan diantara mereka. Hal ini karena satu-satunya moda transportasi yang digunakan masyarakat Sabang menuju Banda Aceh atau sebaliknya, adalah transportasi laut yang dilayari KMP. BRR dan Kapal Motor Express. Ini membuat mereka sering berjumpa diatas kapal walau tidak bertutur sapa secara langsung akan tetapi sudah mengenal wajahnya. Dengan seringnya perjumpaan tersebut, mereka semakin saling mengenal bahwa mereka adalah sama-sama penduduk Sabang.

Penelitian ini mengambil fokus pada konsep harmonisasi. Harmonisasi berasal dari kata harmoni yang memiliki makna keserasian, keselarasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Depdikbud RI (1984:257) disebutkan bahwa harmonisasi berarti pengharmonisan dan pencarian keselarasan. Dengan demikian, harmonisasi

memiliki makna yang sama dengan kerukunan, yang berasal dari kata rukun yang pada dasarnya memiliki makna terciptanya kedamaian dan persahabatan yang baik diantara mereka. Dengan terciptanya kerukunan berarti dari kehidupan individu jauh dari konflik, yang mana timbulnya konflik pada dasarnya akibat perasaan tidak puas terhadap individu yang lainnya dalam kelompoknya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Depdikbud RI (1984:835) mengemukakan, “Rukun adalah keadaan yang baik dan damai dalam suatu pertalian persahabatan tanpa adanya suatu pertentangan atau perselisihan”.

Harmonisasi kehidupan masyarakat di Kota Sabang dari masa lampau berlangsung dengan sangat baik. Tidak pernah muncul ke permukaan adanya konflik yang bernuansa etnik. Indra Muda dalam Opini Waspada (2008) “Kota Sabang, dengan luas 153 km² di ujung barat Pulau Sumatera terdiri dari 5 buah pulau yaitu, Pulau Weh, Pulau Rubiah, Pulau Klah, Pulau Selako dan Pulau Rondo, dimana pulau Weh adalah pulau yang terbesar diantara kelima pulau tersebut”. Pintu masuk menuju Sabang dari Banda Aceh ditempuh menggunakan jasa angkutan laut, sedangkan jasa angkutan udara biasanya digunakan TNI Angkatan Udara untuk mendistribusikan kebutuhan logistik kepada kesatuannya yang bermarkas di Kota Sabang. Dalam wilayah yang terdiri dari beberapa pulau tersebut dihuni etnik yang berbeda dengan etnik Aceh sebagai etnik mayoritas, hidup secara rukun.

Terpeliharanya kerukunan hidup antar etnik tentunya menjadi modal utama untuk kelangsungan pembangunan. Subanindyo (2010:101), “Masalah keupayaan mewujudkan integrasi sosial merupakan agenda yang sangat penting dan merupakan salah satu prioritas utama

pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia”. Hal ini tentu memiliki alasan karena, Indonesia yang terdiri dari beberapa etnik, suku, agama yang berbeda apabila bersatu padu akan menjadi kekuatan yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, dan apabila sebaliknya terjadi perpecahan atau konflik tentunya akan dapat berubah menjadi faktor penghambat untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Prioritas utama dari pada integrasi sosial pada dasarnya adalah menciptakan keadaan yang memungkinkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda dapat hidup secara harmoni dan saling bekerja sama secara produktif. Selain dari pada itu, integrasi sosial akan lebih mudah diraih mana kala harkat dan martabat manusia dihormati serta hak-hak asasi manusia secara universal diakui. Oleh karena itu, diperlukan situasi kondusif yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat lebih tanggap terhadap keperluan masyarakat, agar masyarakat mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Fenomena yang tidak bisa dipungkiri bahwa, Indonesia yang terdiri dari bermacam etnis, yang menjadi musuh utamanya adalah masalah disintegrasi sosial. Hal ini terjadi akibat adanya berbagai bentuk kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, sosial, politik, hukum dan kesenjangan budaya. Kesenjangan ini acapkali ditumpangi isu pramodial seperti pembedaan suku, pembedaan agama, pembedaan etnik, pembedaan ras dan antar golongan. Ketika mencapai muara yang semakin dalam, maka pengentasannya semakin menyulitkan pemerintah. Oleh karena itu, untuk menjaga kerukunan bangsa diperlukan upaya berkelanjutan dan menyeluruh untuk mengatasi kesenjangan.

Masyarakat Aceh, termasuk Kota Sabang, pernah mengalami stagnasi sosial

yang mendalam. Ketika status Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan, masyarakat sangat sulit membedakan siapa yang menjadi kawan ataupun lawan. Doktrin militer sangat kental dengan alasan untuk memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka. Penanganan gejolak sosial melalui pendekatan militer berpengaruh terhadap konflik horizontal. Tidak jarang dengan mudahnya seseorang menuduh orang lain sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka dan tanpa banyak proses, pasukan militer melakukan tindakan yang melanggar HAM. Subanindyo (1998:32), “Penetapan DOM di Aceh dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 menyebabkan terjadinya pelbagai kekerasan. Pelanggaran HAM menyebabkan rakyat Aceh menderita”.

Dengan demikian, hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membangun harmonisasi atau kerukunan hidup dalam suatu masyarakat terutama yang diisi berbagai etnis, maka keadilan ekonomi, keadilan politik, hukum dan sosial merupakan kunci utamanya. Karena, suasana harmonisasi yang terpelihara selama ini apabila mengandung nilai-nilai diskriminatif lama kelamaan akan dapat berubah menjadi pertikaian atau konflik secara terbuka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor yang mendorong terciptanya komunikasi antaretnis di Pulau Weh-Sabang. Selain itu, penelitian ini juga melihat sejarah masa lalu Kota Sabang sebagai pelabuhan bebas mempengaruhi pola pikir kemajemukan masyarakat Kota Sabang.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan pendekatan historis kualitatif, yaitu dengan mempelajari budaya dan adat istiadat masyarakat Kota

sabang sejak jaman kerajaan Aceh hingga era reformasi ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan latar belakang yang wajar atau alamiah, prosesnya membentuk siklus yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan *field research* sehingga dapat diperoleh kejelasan, kelayakan dan kedalaman data.

Cara pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung untuk mengetahui kondisi objek tentang berbagai aktivitas masyarakat kota Sabang dalam hal tata cara pergaulan, penghargaan terhadap etnik dan agama yang berbeda. Moleong (2005:176) mengemukakan bahwa pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan informan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Informan terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas memberikan keterangan sesuai data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Terkait dengan bentuk wawancara ini, Burhan Bungin (2001:110) mengemukakan bahwa wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang pokok yang diteliti, yang dilakukan secara teliti dan berulang-ulang.

Studi literatur untuk memperoleh data sekunder yang relevan untuk menjelaskan kondisi objek penelitian. Sumber-sumber data sekunder tersebut antara lain adalah dokumen resmi dari

instansi pemerintah seperti, Kantor Walikota Sabang, Kantor Camat Sukakarya dan Kantor Camat Sukajaya, Dewan Kebudayaan Aceh, Dinas Syariah, kantor Statistik dan instansi terkait lainnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Kota Sabang tahun 2014. Dari komposisi populasi tersebut jumlah sampel tidak dibatasi atau tidak ditetapkan secara terperinci, namun latar belakang sampel ditetapkan, yaitu berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kalangan pemuda. Apabila objek yang ditanyakan kepada responden sudah jenuh, dalam arti jawaban yang diberikan sudah sama, maka proses wawancara dihentikan.

Burhan Bungin (2003:57) mengemukakan bahwa bergulirnya pemilihan sampel melalui teknik *snowball sampling*, baik untuk sampel informan maupun situasi sosial. Pada akhirnya, akan sampai pada suatu batas dimana tidak dijumpai lagi variasi informasi (terjadi kejenuhan informasi). Pada saat seperti ini pemilihan sampel baru tidak diperlukan lagi. Dengan kata lain, kegiatan pengumpulan data atau informasi di lapangan dianggap berakhir.

Selain dari sampel penelitian tersebut, yang menjadi informan pangkal adalah Walikota Sabang, Camat Kecamatan Suka Karya, Camat Kecamatan Sukajaya, para Kepala Desa dan Lurah di kedua kecamatan tersebut.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu kemudian dideskripsikan sehingga mudah difahami dan dimengerti. Moleong (2005:247) mengemukakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.

Setelah proses analisis data, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah reduksi data, yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya, kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan tersebut lalu dikategorisasikan (Moleong, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stagnasi sosial yang dialami masyarakat Aceh saat menyandang status Daerah Operasi Militer (DOM), sangat sulit untuk membedakan siapa yang menjadi kawan ataupun lawan. Doktrin militer lekat dengan alasan untuk memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka. Penanganan gejolak sosial melalui pendekatan militer berpengaruh terhadap konflik horizontal. Tidak jarang dengan mudahnya seseorang menuduh orang lain sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka dan tanpa banyak proses, pasukan militer melakukan tindakan yang melanggar HAM. Penetapan DOM di Aceh dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 menyebabkan terjadinya pelbagai kekerasan. Pelanggaran HAM menyebabkan rakyat Aceh menderita.

Kendati konflik horizontal yang tergolong dahsyat pernah berkejolak di tanah Aceh, tidak memiliki pengaruh besar di Pulau Weh-Sabang. Hal ini mungkin berkaitan dengan sejarah panjang yang dilaluinya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Sabang terkenal sebagai jalur lalu lintas maritim dunia dari barat ke timur dan sebaliknya yang ramai disinggahi kapal-kapal dalam dan luar negeri. Pada awal kemerdekaan, Kota Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan

Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Ketika menyandang status Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas, Kota Sabang ramai dengan hiruk-pikuk perdagangan dengan pelaku-pelaku ekonominya yang terkenal dengan nama “*jangek*”. Kemudian terpuruk kembali ketika secara resmi ditutup sebagai Pelabuhan Bebas pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 1993 dibentuk kerjasama ekonomi regional yaitu *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) yang membuat posisi pulau ini sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan. Pada tahun 1998, kota Sabang dan kecamatan *Puloaceh* di Kabupaten Aceh Besar dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan Presiden B.J. Habibie dengan Kepres No. 171 tanggal 28 September 1998.

Dengan sederet pengalaman sejarah yang dilalui Kota Sabang tersebut, sedikit banyak berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya. Mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan etnis non-Aceh dapat memahami perbedaan etnis, agama dan suku yang berbeda.

Pola kehidupan masyarakat kota Sabang sering dijuluki penduduknya sebagai Kota Kelelawar karena siang hari terlihat sepi dan pada malam hari baru mulai terlihat aktivitas dan sedikit keramaian. Kota Sabang masih bergantung dalam matarantai suplai makanan dan minuman dari daratan Sumatera melalui pelabuhan Uleelhee, Banda Aceh yang dijembatani melalui kapal Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, dan dua unit kapal ekpres.

Kota Sabang yang memiliki penduduk lebih kurang 30.647 jiwa terdiri dari multi etnis, antara lain; Aceh, Jawa, Padang, Tapanuli, Cina dan lain-lain

dengan mata pencaharian sebagai pegawai, pedagang, nelayan, tukang dan petani. Dari berbagai etnis ini, yang paling kuat pengaruhnya adalah adat dan budaya Aceh. Pengaruh Budaya Aceh tertanam pada kehidupan masyarakat, ini tak lain karena mayoritas masyarakatnya adalah Suku Aceh dan beragama Islam. Sedangkan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Aceh dan bahasa Indonesia

Ketika melakukan kunjungan ke kota Sabang, penulis menyempatkan diri duduk dan berbincang di salah satu warung kopi yang merupakan tempat favorit warga 'ngumpul-ngumpul' pagi, sore dan malam hari.

Ketika sore menjelang malam di salah satu warung kopi di Simpang Merauke Jalan Chikditiro Sabang, penulis menemukan sekelompok warga duduk bercanda ria. Komunitas warga yang berkumpul tersebut tidak hanya dari etnis Aceh melainkan dari etnis yang lain. Dalam canda dan kebersamaannya, mereka bergantian menegur dan mengangkat tangan kepada beberapa orang yang lalu lalang di jalanan depan warung kopi. Hal ini memberikan kesan bahwa warga Sabang terutama di wilayah Kota saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya karena dalam pembicaraan mereka turut mengungkap identitas orang yang baru saja mereka tegur. Pada hari berikutnya di pagi hari, secara kebetulan penulis duduk di salah satu warung kopi yang berada di Jalan Perdagangan Kota Sabang. Suasana keakraban dan kebersamaan juga penulis rasakan diantara warga yang duduk dengan etnis yang berbeda.

Memperhatikan suasana keakraban tersebut, penulis lalu mengajak mereka bincang-bincang tentang kerukunan antar etnis di Kota Sabang. Mereka sependapat bahwa Sabang berbeda dengan daerah lainnya di NAD. Rasa persaudaraan dan kekompakan lebih melekat. Hal ini karena

Sabang berada dalam suatu pulau. Apabila ingin menuju Banda Aceh, satu-satunya pintu masuk dan keluar adalah melalui Pelabuhan Balohan-Ulee Lheue dengan armada laut kapal penyeberangan KMP BRR dan kapal ekspres. Dengan jalur lalu lintas ini, diantara warganya sering bertemu walau terkadang tidak mengetahui namanya. Oleh karena itu, tegur sapa akan selalu terjadi diantara warganya. Pada saat penulis menelusuri beberapa jalan di Kota ini, tegur sapa antara pengendara dan pejalan kaki senantiasa berlangsung dengan akrab. Oleh karena itu bagi pendatang atau wisatawan yang datang ke kota ini sangat merasa aman dan tidak merasa asing di tengah-tengah warga Sabang yang ramah. Dengan suasana kerukunan antaretnis ini, penulis memiliki kesan bahwa warga Sabang dapat menikmati makna, "Damai Itu Indah".

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan, kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Komunikasi antar etnis di kota Sabang sangat kuat dibandingkan daerah lainnya di NAD. Meskipun suku Aceh merupakan penduduk mayoritas, tapi tidak merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap etnis lainnya.
2. Sejarah masa lalu kota Sabang yang pernah menyandang status sebagai pelabuhan bebas juga merupakan faktor pendorong keterbukaan masyarakatnya terhadap komunitas etnis yang berbeda.

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, penulis mengemukakan saran kepada Pemerintah Kota Sabang supaya tetap terbuka untuk memfasilitasi kebutuhan etnis yang berbeda misalnya, memberikan kesempatan untuk

mengembangkan budaya dan adat istiadatnya. Hal ini tentu saja akan dapat menjadi daya tarik untuk memikat kedatangan wisatawan yang gencar dilakukan pada tahun-tahun terakhir. Selain itu, etnis non-Aceh terutama yang bukan beragama Islam supaya tetap mentaati dan menjunjung tinggi Syariah Islam yang berlaku di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk di Kota Sabang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burhan, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fikar W, Eda dan S. Satya Dharma, 1999, *Aceh Menggugat*. Medan: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy, J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sumber lain:

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Eda, F. W. & Idria, R. (2007). *Sabang, Menyusur Jejak Pelabuhan Bebas*, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Diterbitkan oleh CV. Balohan Haloban.
- Muda, I. (2008). *Menelusuri Objek-objek Wisata di Pulau Weh-Sabang*. Diterbitkan di surat kabar Waspada 18 Oktober 2008.
- (2014). *Kerukunan Antar Etnik di Pulau Weh-Sabang*. Diterbitkan di surat kabar Analisa, 26 Desember 2014.

